

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN DISERTAI MUTILASI (Studi Putusan Nomor:231/Pid.B/2022/PN Sdn)

Oleh

PUTRI SINTIA WATI

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan pada anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian disertai mutilasi, dimana pelaku telah menghilangkan nyawa anak dan harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian disertai mutilasi dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak sehingga menyebabkan kematian disertai mutilasi berdasarkan Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Sdn.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yang mencari dan mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan terhadap peraturan Undang-Undang, buku-buku hukum, artikel hukum, putusan hakim, media massa, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas penulis dalam skripsi ini. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari 1 orang Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu perbuatan yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian disertai mutilasi adalah dengan dijalaninya hukuman sesuai putusan hakim yakni dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Serta, Dasar pertimbangan hukum Hakim di Pengadilan Negeri Sukadana dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 231/Pid.B/2022/PN Sdn terhadap Terdakwa Hairul Anwar Bin Helmi Anis, menjerat pelaku dengan Pasal 80 Ayat (3) juncto Pasal 76 Huruf c Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi.

Putri Sintia Wati

Saran dalam penelitian ini adalah legislator sebagai pembuat undang-undang perlu memperhatikan dan merumuskan pasal tentang sanksi pidana pembunuhan yang disertai mutilasi untuk mengisi menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Serta dibutuhkan pembaruan legislasi oleh DPR dan Pemerintah terkait revisi mengenai pembunuhan yg disertai mutilasi dalam KUHP, agar memberikan pedoman pemidanaan yang lebih rinci sehingga meminimalisir disparitas putusan (hukuman yang tidak setara untuk kasus serupa) di masa depan.

Kata Kunci: Anak, Mutilasi, Pertanggungjawab Pidana

ABSTRAK

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN RESULTING IN DEATH AND MUTILATION (Study Decision Number: 231/Pid.B/2022/PN Sdn)

By

PUTRI SINTIA WATI

Criminal liability for perpetrators of violence against minors resulting in death accompanied by mutilation, where the perpetrator has taken the child's life and must be responsible for his actions. Therefore, the problem in this study is how the criminal liability of perpetrators of violence against children resulting in death accompanied by mutilation and how the judge's legal considerations in passing a verdict against perpetrators of criminal acts of violence against children resulting in death accompanied by mutilation based on Decision Number 231/Pid.B/2022/PN Sdn.

The research method used in writing this research is a normative method that seeks and collects data through library research on statutory regulations, law books, legal articles, judges' decisions, mass media, and scientific journals related to the problems discussed by the author in this thesis. The resource person in this research consists of 1 lecturer from the Criminal Department of the Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the study show that criminal responsibility is an act that is criminally accountable for a person who commits a criminal act or crime. The criminal responsibility of the perpetrator of violence against children that causes death accompanied by mutilation is to serve a sentence according to the judge's decision, namely imprisonment for 15 (fifteen) years and a fine of IDR 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah) with the provision that if the fine is not paid it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months. As well as, the basis for the legal considerations of the Judge at the Sukadana District Court in examining and trying criminal case Number 231 / Pid.B / 2022 / PN Sdn against the Defendant Hairul Anwar Bin Helmi Anis, charged the perpetrator with Article 80 Paragraph (3) in conjunction with Article 76 Letter c of Law Number 17 of 2016 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2016 concerning Child Protection into Law has been fulfilled.

Putri Sintia Wati

The suggestion in this study is that legislators as lawmakers need to pay attention to and formulate articles on criminal sanctions for murder accompanied by mutilation to create peace in society. Judges should not be hasty because in making decisions, they must be based on the facts presented in court and taken based on the judge's deliberations. In addition, judges should be more objective in adjudicating cases by carefully examining and considering the facts revealed in court and connecting them with existing laws.

Keywords: Children, Mutilation, Criminal Responsibility